



Katalog BPS : 4103.5301

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMBA BARAT 2011

kependudukan

kesehatan & gizi

pendidikan

ketenagakerjaan

pola konsumsi

perumahan & lingkungan



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMBA BARAT 2011

.....

No. Publikasi / Publication Number : 53012.001

Katalog BPS / BPS Catalogue : 4103.5301

Ukuran Buku / Book Size : 21,59 cm x 27,94 cm

Jumlah Halaman / Total Pages : 46 Halaman / Pages

Naskah / Manuscript :

Seksi Statistik Sosial

Social Statistics Section

Gambar Kulit / Cover Design :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Integration Processing and Statistical Dissemination Section

Diterbitkan oleh / Published by :

BPS Kabupaten Sumba Barat

BPS - Statistics of Sumba Barat Regency

Dicetak oleh / Printed by :

CV. Aneka Surya

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat 2011” disusun guna memenuhi kebutuhan pengguna data statistik, khususnya statistik sosial. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat kembali menerbitkan Publikasi ini.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman berbagai data dasar yang bersumber dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS serta data sekunder yang diperoleh dari instansi lain di luar BPS.

Penerbitan publikasi ini merupakan hasil kerja sama BPS Kabupaten Sumba Barat, dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat khususnya dalam penyediaan dana tambahan sehingga data yang disajikan menjadi lebih lengkap serta perwajahan yang lebih baik.

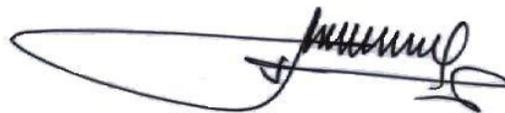
Maksud penerbitan publikasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kesejahteraan rakyat Sumba Barat dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Waikabubak, Oktober 2011

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. Suprih Handayani
NIP. 19660703 199401 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Pendahuluan	viii
1. Kependudukan	1
- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
- Kepadatan Penduduk	2
- Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	3
- Perkawinan dan Keluarga Berencana	6
2. Kesehatan dan Gizi	10
- Status Kesehatan	10
- Status Gizi Balita	11
- Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	13
3. Pendidikan	16
- Tingkat Pendidikan	16
- Tingkat Partisipasi Sekolah	18
- Fasilitas Pendidikan	19
4. Ketenagakerjaan	21
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja..	21
- Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	23
- Jam Kerja	25
5. Pola Konsumsi	27
- Perubahan Tingkat Kesejahteraan	27
- Pola Konsumsi Rumah Tangga	29
6. Perumahan dan Lingkungan	30
- Kualitas Rumah Tinggal	30
Daftar Pustaka	34
Istilah Teknis	35

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007-2010 ...	1
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2009 dan 2010	2
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010	3
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010	4
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2009-2010	6
Tabel 1.6	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2009-2010	7
Tabel 1.7	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/ Cara KB Tahun 2009-2010	8
Tabel 1.8	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2009-2010.....	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2010 ...	10
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2009-2010.....	12
Tabel 2.3	Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2009 dan 2010	12
Tabel 2.4	Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2009-2010	13
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2009-2010	14
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2009-2010	15
Tabel 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2010	16

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2009-2010	17
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2009-2010	18
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2010	19
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2009-2010.	20
Tabel 4.1	TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	22
Tabel 4.2	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	22
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010	23
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2010	24
Tabel 4.5	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2010	24
Tabel 4.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang Dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	26
Tabel 5.1	Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2009-2010	28
Tabel 5.2	Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2010 (Rupiah)	29
Tabel 6.1	Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2009-2010	31
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2009-2010.....	32

DAFTAR GAMBAR

	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2009 dan 2010.....	2
Gambar 1.2	Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2010..	5
Gambar 1.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2010....	6
Gambar 1.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Status Perkawinan Tahun 2010...	7
Gambar 1.5	Wanita 10 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2009-2010.....	8
Gambar 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2010.....	11
Gambar 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2010.....	17
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010	21
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010	23
Gambar 5.1	Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2010	29
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2010.....	31
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2009-2010.....	32

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat 2011 ini merupakan lanjutan dari seri publikasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan rakyat secara garis besar, diperlukan pengelompokan beberapa masalah sosial yang penting. Ada beberapa tabel yang tidak dimuat kembali dan ada pula data-data baru yang dimasukkan. Penyajian masalah sosial tersebut dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Indikator yang disajikan pada dasarnya berbentuk deskriptif yang telah dipilih, dengan harapan dapat menggambarkan suatu keadaan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk penyajian data, selain tabel dasar pada beberapa kelompok disajikan ukuran statistik yang lazim dipergunakan seperti persentase, rasio, proporsi, dan rata-rata yang kesemuanya ditujukan untuk memperjelas perubahan yang terjadi.

2. Sumber Data

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, dan 2010.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu pendataan bangunan (listing) dan pencacahan lengkap. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 39 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan
- (b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
- (c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumahtangga, Kriminalitas

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Sejak tahun 2004, kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan kembali dilakukan secara semesteran. Pelaksanaan Sakernas Semesteran 2008-2010 merupakan lanjutan Sakernas Semesteran sebelumnya yang dimulai pada Pebruari 2008 (Semesteran I), dan Oktober 2008 (Semesteran II) dan terus berlanjut sampai tahun 2011 ini.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Inkesra 2011 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder.

1. Kependudukan

1. Kependudukan

Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban (*liability*) pembangunan jika berkualitas rendah.

Berbagai hal tentang penduduk yang perlu diamati antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk, dan lain-lain sangat penting dan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Sumba Barat pada tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) mencapai 110.993 jiwa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Sumba Barat selama periode 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007-2010

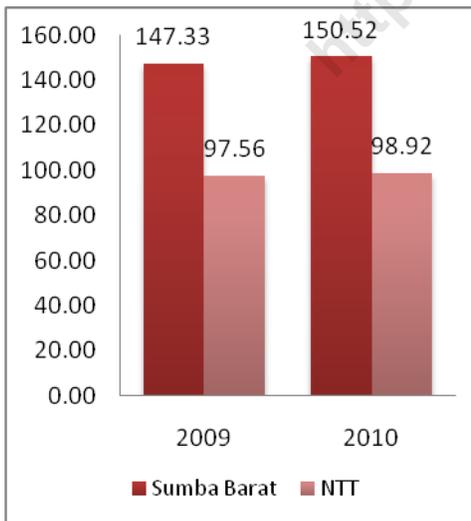
Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2007	104.383	4,76
2008	106.524	2,05
2009	108.644	1,99
2010	110.993	2,16

Baik secara absolut maupun relatif (yang dilihat dari laju pertumbuhan penduduk) terlihat bahwa jumlah penduduk Sumba Barat terus bertambah. Kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten, karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat mengakibatkan beban pembangunan yang semakin berat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi jika mampu diseimbangkan/di-selaraskan/diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi serta sosial budaya dapat menjadi salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan.

Kepadatan Penduduk

Gambar 1.1
Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2009 dan 2010 (Jiwa/Km²)



Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas daratan sebesar 737,42 km² atau 1,56 persen dari total luas daratan wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai rata-rata kepadatan penduduk sebesar 151 jiwa per km² pada tahun 2010. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2009 adalah sebesar 147 jiwa per km².

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2009 dan 2010

Uraian	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Sumba Barat	147,33	150,52
N T T	97,56	98,92

Jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur, maka rata-rata

kepadatan penduduk Sumba Barat berada di atasnya baik pada keadaan tahun 2009 maupun tahun 2010. Rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 adalah 98 jiwa per km² dan 99 jiwa per km² pada tahun 2010.

Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur sangat penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Komposisi penduduk menurut umur juga sangat penting dalam kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur. Kebutuhan akan suatu pelayanan bervariasi sepanjang siklus kehidupan. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk umur sekolah dasar (umur 7-12 tahun) sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar akan cukup tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 (Berdasarkan SP 2010)

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		L + P	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	8.315	14,46	7.816	14,61	16.131	14,53
5-9	8.038	13,98	7.462	13,95	15.500	13,96
10-14	7.183	12,49	6.672	12,47	13.855	12,48
15-19	5.564	9,68	5.108	9,55	10.672	9,62
20-24	4.340	7,55	3.619	6,76	7.959	7,17
25-29	4.332	7,53	4.067	7,60	8.399	7,57
30-34	3.981	6,92	3.777	7,06	7.758	6,99
35-39	3.545	6,17	3.342	6,25	6.887	6,20
40-44	2.990	5,20	2.790	5,22	5.780	5,21
45-49	2.526	4,39	2.256	4,22	4.782	4,31
50-54	1.977	3,44	1.911	3,57	3.888	3,50
55-59	1.357	2,36	1.318	2,46	2.675	2,41
60-64	1.162	2,02	1.159	2,17	2.321	2,09
65-69	958	1,67	892	1,67	1.850	1,67
70-74	639	1,11	674	1,26	1.313	1,18
75+	590	1,03	633	1,18	1.223	1,10
Total	57.497	100,00	53.496	100,00	110.993	100,00

Penduduk usia 0-14 tahun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) sebesar 40,98 persen, usia 15-64 tahun sebesar 55,07 persen dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 3,95 persen dari total penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk Sumba Barat tergolong penduduk muda karena persentase penduduk anak-anak (usia di bawah 15 tahun) cukup besar, sementara persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) rendah.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	14,46	14,61	14,53
5-9	13,98	13,95	13,96
10-14	12,49	12,47	12,48
15-19	9,68	9,55	9,62
20-24	7,55	6,76	7,17
25-29	7,53	7,60	7,57
30-34	6,92	7,06	6,99
35-39	6,17	6,25	6,20
40-44	5,20	5,22	5,21
45-49	4,39	4,22	4,31
50-54	3,44	3,57	3,50
55-59	2,36	2,46	2,41
60-64	2,02	2,17	2,09
65-69	1,67	1,67	1,67
70-74	1,11	1,26	1,18
75+	1,03	1,18	1,10
Total	100,00	100,00	100,00

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan masih belum signifikan, terlihat pada komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan masih tingginya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia), disebabkan karena semakin meningkatnya kelahiran dan meningkatnya penduduk usia tua. Hal ini berarti bahwa Angka Beban Ketergantungan (*ABK/dependency ratio*) akan besar. *ABK* pada tahun 2010 mencapai 81,60. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap 100

penduduk produktif menanggung 82 penduduk tidak produktif.

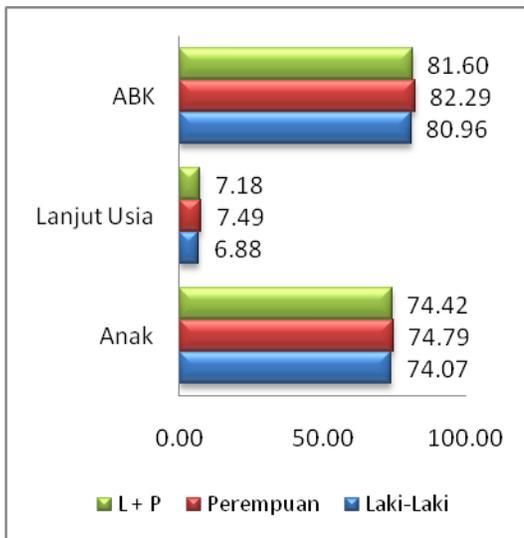
Pada tahun 2010 persentase penduduk anak-anak di Sumba Barat adalah 40,98 persen sedangkan persentase penduduk lanjut usia sebesar 3,95 persen. Dengan demikian, beban tanggungan anak (*child dependency*) cukup tinggi yaitu sebesar sebesar 74,42 dari ABK yang berjumlah 81,60. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung diikuti oleh angka beban tanggungan anak yang tinggi pula. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia (*old aged dependency*) pada tahun 2010 relatif kecil, yaitu 7,18.

Ukuran yang paling umum untuk melihat struktur jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

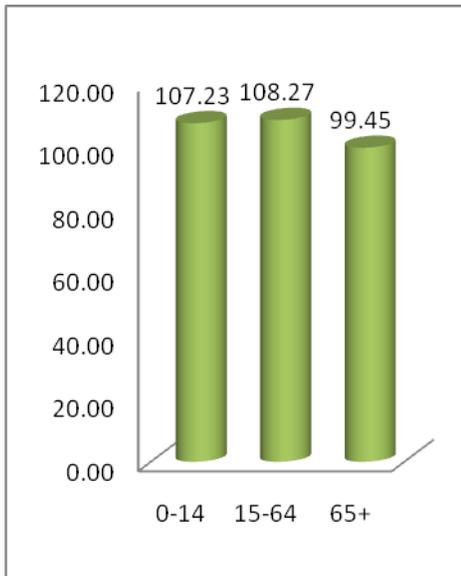
Ketidakseimbangan dalam struktur jenis kelamin merupakan salah satu masalah kependudukan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi dan dapat mempengaruhi penyediaan pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan, jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan berbeda.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada waktu lahir biasanya di atas angka 100, yang artinya jumlah bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan umur (sampai umur belasan), maka rasio jenis kelamin ini turun mendekati angka 100. Pada umur selanjutnya jumlah penduduk perempuan biasanya melebihi banyaknya penduduk laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya di bawah angka 100. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada kelompok umur muda, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kelompok umur tua. Pola semacam ini biasanya dikaitkan dengan daya tahan hidup perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

Gambar 1.2
Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2010



Gambar 1.3
Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2010



Dari tabel 1.4 dapat dihitung bahwa rasio jenis kelamin untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2010 adalah sebesar 107,23 dan kelompok umur 15-64 adalah 108.27. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas Rasio Jenis Kelaminnya adalah 99,45 yang berarti dari 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki.

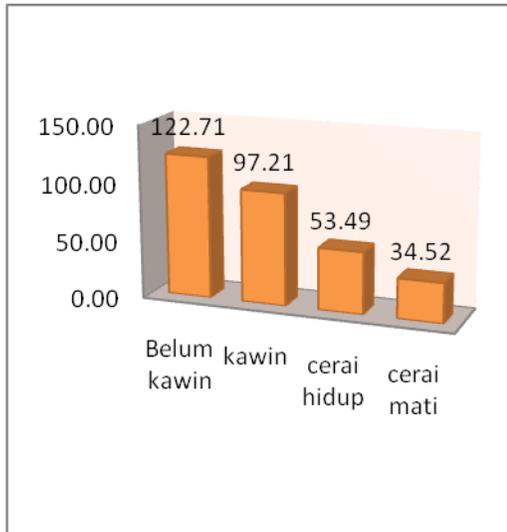
Perkawinan dan Keluarga Berencana

Perkawinan merupakan tuntutan biologis manusia yang berdampak menumbuhkan generasi baru. Akibatnya pertambahan penduduk tidak dapat dihindari yang pada gilirannya memberi tekanan pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana adalah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2009-2010

Status	2009			2010		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	47,1	38,4	42,7	65,59	57,54	61,77
Kawin	48,9	51,2	50,1	31,89	35,32	33,52
Cerai Hidup	0,9	1,9	1,4	0,65	1,31	0,96
Cerai Mati	3,1	8,5	5,8	1,87	5,83	3,75

Gambar 1.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut
Status Perkawinan
Tahun 2010



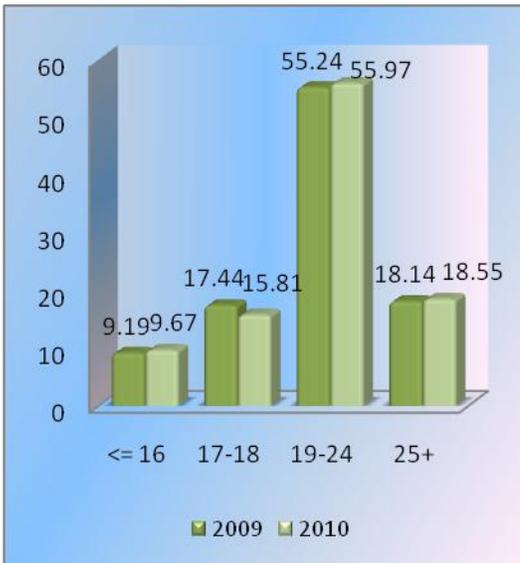
Dari tabel 1.5 tampak bahwa proporsi kelompok yang belum kawin pada tahun 2010 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2009 maka secara umum terjadi peningkatan jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berada pada kelompok Belum Kawin dengan persentase sebesar 61,77 persen. Jika dilihat dari Rasio Jenis Kelamin menurut Status Perkawinan pada tahun 2010 Status Belum Kawin rasionya adalah 122,71. Hal ini berarti pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki yang belum kawin dalam seratus penduduk perempuan yang belum kawin adalah 122 orang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki untuk menunda melakukan perkawinan. Sebaliknya, pada kelompok kawin tampak bahwa proporsi penduduk perempuan tidak jauh berbeda daripada proporsi penduduk laki-laki pada periode yang sama. Dapat terlihat pada Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Status Perkawinan status Kawin rasionya adalah 97,21 yang berarti terdapat 97 laki-laki status Kawin dalam 100 orang perempuan yang berstatus Kawin.

Pada kelompok cerai hidup tahun 2010 proporsi laki-laki jauh lebih sedikit dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin 53,49. Pada kelompok cerai mati proporsi perempuan masih lebih tinggi dengan rasio jenis kelamin 34,52. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih suka memilih untuk tetap hidup sendiri daripada penduduk laki-laki.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2009-2010

Umur Perkawinan Pertama	2009	2010
(1)	(2)	(3)
≤ 16	9.19	9.67
17-18	17.44	15.81
19-24	55,24	55.97
25+	18.14	18.55

Gambar 1.5
Persentase Wanita 10 Tahun ke
Atas yang Pernah Kawin
Menurut Umur Perkawinan
Pertama Tahun 2009-2010 (%)



Dipandang dari umur perkawinan pertama perempuan, persentase penduduk perempuan yang kawin di bawah umur 19 tahun pada tahun 2009 adalah 26,63 persen dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 25,48 persen. Dengan demikian, kesadaran kaum perempuan untuk tidak kawin pada usia muda telah berhasil diterapkan. Sementara itu, pada kelompok 19 tahun ke atas, persentase penduduk perempuan yang pernah kawin sebesar 73,38 persen pada tahun 2009 dan 74,52 persen pada tahun 2010. Dengan keadaan ini, diharapkan penduduk perempuan yang mempunyai status kawin dapat menjadi ibu yang berkualitas sehingga mampu melahirkan anak yang berkualitas pula sehingga sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur dan khususnya Sumba Barat menjadi semakin berkualitas.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/Cara KB Tahun 2009-2010

Sedang Menggunakan Alat KB?	2009	2010	
	(1)	(2)	(3)
Ya	29,04	19,52	
Tidak	70,96	80,48	

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2010, terdapat sebanyak 19,52 persen penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status kawin yang sedang memakai/menggunakan alat/cara KB. Sedangkan penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status yang sama tapi tidak memakai/menggunakan alat KB sebanyak 80,48 persen pada tahun 2010.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2009-2010

Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai	2009	2010
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	6,36	9,09
MOP/Vasektomi	1,39	3,31
AKDR/IUD	11,97	5,79
Suntikan	57,12	51,24
Susuk KB	12,02	9,09
Pil KB	9,58	14,88
Kondom	0,86	1,65
Intravag	0,00	2,48
Alat/Cara Tradisional	0,7	2,47

Pada tahun 2010 sebanyak 46,66 persen dari penduduk perempuan Sumba Barat berada pada usia 15-49 tahun. Sedangkan yang memiliki status kawin dan sedang memakai/menggunakan alat KB, lebih dari setengahnya memakai/menggunakan suntikan sebagai alat/cara KB dengan persentase sebesar 51,24 persen. Dan diurutkan berikutnya adalah dengan menggunakan pil KB dengan persentase sebesar 14,88 persen. Sedangkan susuk KB dan MOW berada di urutan ketiga dengan persentase pemakai/pengguna sebesar 9,09 persen. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak-anak yang dilahirkannya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

2. Kesehatan & Gizi

Kesehatan dan Gizi

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional/regional, karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang biasa dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti cakupan imunisasi, penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Status Kesehatan

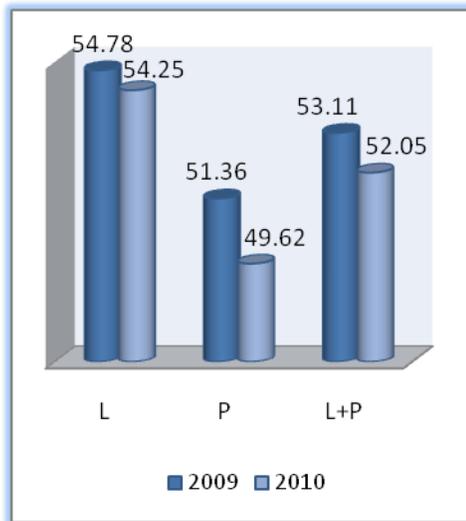
Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, oleh karena, misalnya, pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan salah satunya indikator angka kesakitan.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2010

Angka Kesakitan*)	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	54,78	54,25
Perempuan	51,36	49,62
L + P	53,11	52,05

*) *Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan yang lalu*

Gambar 2.1
Angka Kesakitan
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009-2010



Pada tahun 2009 penduduk yang mempunyai keluhan kesakitan mencapai 53,11 persen. Pada tahun 2010 angka tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu 52,05 persen, atau lebih dari setengah penduduk Sumba Barat pernah mengalami gangguan kesehatan yang berakibat terganggunya pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat masih belum cukup baik. Status kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun tampak bahwa proporsi penduduk laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Status Gizi Balita

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk Sumba Barat. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa umumnya anak usia 2-4 tahun di Sumba Barat mendapatkan ASI selama 12-17 bulan, yang idealnya selama 24 bulan. Untuk kelompok 18 bulan ke atas pada tahun 2010 sebanyak 28,25 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 37,45 persen. Sedangkan Anak Usia 2-4 Tahun yang diberikan ASI, mayoritasnya berada pada kelompok (12-17 bulan) yang persentasenya mencapai 47,42 persen pada tahun 2010.

Tabel 2.2 Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2009-2010

Lamanya Disusui (Bulan)	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Tidak disusui	0,00	0,00
0	0,00	0,00
1-5	1,02	5,90
6-11	9,54	18,43
12-17	51,99	47,42
18-23	12,63	15,23
24+	24,82	13,02

Dilihat dari status gizi balita, perkembangan selama periode 2009-2010, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat tabel 2.3 memperlihatkan status gizi balita di Sumba Barat. Selama kurun waktu 2010 masih ditemukan balita dengan status gizi buruk (termasuk gizi kurang dan merasmus) sebanyak 145 balita.

Tabel 2.3 Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2009-2010

Status Gizi	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Baik	88,81*)	-
Sedang		-
Kurang	10,04	-
Buruk	1.15	145 balita

Keterangan : *) Termasuk status gizi sedang

Sumber : Dinkes Kab. Sumba Barat, data balita yang bergizi baik, sedang dan kurang tidak tersedia

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Data pada Tabel 2.4 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 terdapat 30 dokter untuk setiap 100.000 penduduk. Jumlah yang mengalami penurunan dibanding kondisi tahun 2009. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan terdapat di setiap kecamatan yang pada tahun 2010 berjumlah 24 puskesmas, atau untuk setiap 100.000 penduduk tersedia sekitar 22 puskesmas. Di sini terlihat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar belum bisa diimbangi dengan penambahan fasilitas kesehatan yang memadai. Sementara untuk tenaga kesehatan di puskesmas, meskipun tidak begitu besar rasio dokter per puskesmas sebesar 1,38 pada tahun 2010.

Tabel 2.4 Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2009-2010

Tenaga/Sarana Kesehatan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dokter per 100.000 Penduduk	37,74	29,73
Jumlah Dokter per Puskesmas	1,71	1,38
Jumlah Puskesmas *)	24	24
Jumlah Puskesmas per 100.000 Penduduk	22,09	21,62
Jumlah Rumah Sakit	2	2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	188	216
Jumlah Tempat Tidur per 100.000 Penduduk	173,04	194,61

*)Termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus datang ke rumah sakit. Pada tahun 2010 terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat. Kedua Rumah Sakit tersebut memiliki kapasitas 216 tempat tidur. Kondisi kapasitas tempat tidur ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut dan jumlah penduduk yang terus meningkat, berarti untuk setiap 100.000 penduduk tersedia sekitar 195 tempat tidur pada tahun 2010.

Bagian penting dalam upaya mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal (ibu) adalah penyediaan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Program bidan di desa (BDD) merupakan upaya terobosan untuk maksud tersebut. Sampai dengan tahun 2010 jumlah bidan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat berjumlah 41 bidan. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2010 telah mencapai 60 desa/kelurahan.

Tabel 2.5 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2009-2010

Penolong Kelahiran Terakhir	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Tenaga Medis	58,51	61,05
Dokter	4,63	12,11
Bidan	53,22	48,46
Tenaga Medis Lain	0,66	0,48
Bukan Tenaga Medis	41,49	38,95
Dukun	39,54	37,77
Famili	1,3	0,71
Lainnya	0,65	0,47

Berkaitan dengan persalinan, diupayakan terus menerus agar penolong persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) meningkat. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 61,05 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 58,51 persen. Jika dilihat lebih rinci, maka penolong persalinan oleh tenaga medis mayoritas tetap dilakukan oleh bidan (48,46 persen), akan tetapi penolong persalinan oleh dokter juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 12,11 persen.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2009, fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluan berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas (60,30 persen), praktik dokter (18,80 persen), rumah sakit (14,91 persen), dan praktik petugas kesehatan (5,45 persen).

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2009-2010

Tempat/Cara Berobat	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	11,86	14,91
Praktik Dokter	15,57	18,80
Puskesmas	54,87	60,30
Poliklinik	-	-
Praktik Petugas Kesehatan	10,51	5,45
Dukun/Tabib/Sinshe/Tradisional	0,3	0,12
Lainnya	6,91	0,42

3. Pendidikan

3. Pendidikan

Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada saat sekarang, jangkauan wajib belajar semakin diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan hampir semua penduduk yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Tingkat Pendidikan

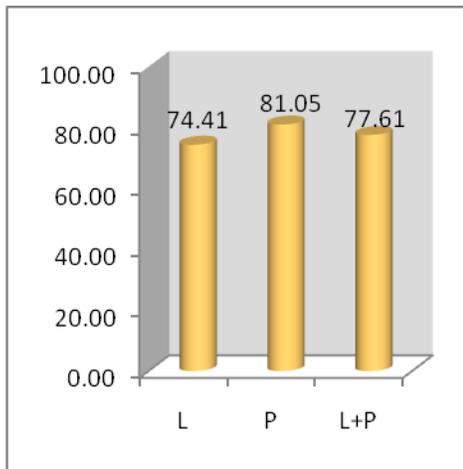
Pada tingkat makro, tingkat pendidikan yang sangat mendasar dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 10 tahun ke atas). Pada tahun 2009 angka melek huruf penduduk Sumba Barat telah mencapai 77,51 persen, dan meningkat menjadi 77,61 pada tahun 2010. Tabel 3.1 menyajikan angka melek huruf menurut jenis kelamin. Angka melek huruf tampak lebih tinggi pada kelompok penduduk perempuan daripada laki-laki.

Selain angka melek huruf, tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, secara umum, tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Tabel 3.1 Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2010

Dapat Baca Tulis	2009			2010		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin	79,25	75,77	77,51	74,41	81,05	77,61
Huruf Lainnya	0,34	0,26	0,30	0,55	0,00	0,28
Latin+Lainnya	7,86	5,32	6,58	10,73	3,95	7,46

Gambar 3.1
Persentase Angka Melek Huruf
Tahun 2010



Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan pendidikan penduduk terus menerus terjadi, yaitu dengan semakin banyaknya penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2009-2010

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2009			2010		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijazah	46,03	46,55	46,29	48,61	47,55	48,10
SD/MI/ Sederajat	22,99	24,02	23,50	22,94	24,74	23,81
SLTP/MTs	12,21	13,28	12,74	9,71	12,76	11,18
SMU/MA/ Sederajat	9,66	8,19	8,93	9,09	7,72	8,43
SM Kejuruan	4,79	4,48	4,63	3,51	3,41	3,46
D I/DII	0,45	0,92	0,68	0,38	1,03	0,69
D III/Sarmud	0,45	0,73	0,85	1,67	0,67	1,19
D IV/S1	0,97	1,83	2,37	3,71	2,11	2,94
S2/S3	2,89	0,00	0,00	0,38	0,00	0,20

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas pada tahun 2009 mencapai 30,20 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 28,09 persen. Jumlah tamatan SD/MI sebesar 23,50 persen pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 23,81 persen pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun yang sama jumlah penduduk

yang tidak mempunyai ijazah SD sebesar 48,10 persen. Lebih banyaknya proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena diketahui juga bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dirasakan sangat mendesak.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan pemerataan pada pemanfaatan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pada tahun 2010, sekitar 124 persen penduduk usia 7-12 tahun telah bersekolah pada sekolah dasar. Angka ini memang agak sulit dipahami, namun data lapangan menunjukkan bahwa masih ada murid sekolah dasar dengan usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2009-2010

Kelompok Umur	2009	2010
(1)	(2)	(3)
7-12	123	124
13-15	73	64
16-18	70	78

Partisipasi sekolah menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada tingkat SD sebanyak 123 persen dan meningkat menjadi 124 persen pada tahun 2010. Sedangkan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tingkat SLTP sebanyak 73 persen pada tahun 2009, dan turun menjadi 64 persen pada tahun 2010. Sedangkan pada penduduk usia 16-18 tahun, partisipasi sekolah kelompok ini pada tahun 2009

sebesar 70 persen dan mengalami peningkatan menjadi 78 persen pada tahun 2010.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2010

Jenjang Pendidikan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
SD	92,45	95,27
SLTP	46,76	53,23
SLTA	49,86	38,08

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 3.4 menunjukkan penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD, yaitu 95,27 persen pada tahun 2010. Untuk jenjang lanjutan tingkat pertama sebesar 53,23 persen. Sementara pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas sebesar 38,08 persen.

Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2010 ini Rasio murid-Guru dan Rasio guru-sekolah sedikit mengalami perubahan, jenjang SD rasio murid-guru sebesar 22, yang artinya ada sebanyak 22 murid yang diawasi oleh setiap guru. Pada jenjang SLTP rasio murid guru tetap 14, artinya setiap guru mengawasi 14 murid. Dan untuk tingkat SLTA, setiap guru mengawasi 20 murid. Keadaan ini memberikan gambaran jumlah guru di Sumba Barat masih belum proporsional dengan banyaknya murid sehingga murid kurang mendapat pengawasan oleh guru. Rasio guru-

sekolah pada tahun 2009 dan 2010 juga mengalami sedikit perubahan, yaitu untuk jenjang SD 11 banding 1, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP sebanyak 12 banding 1, dan untuk jenjang SLTA sebanyak 32 banding 1.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2009-2010

Jenjang Pendidikan	2009		2010	
	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	34	8	22	11
SLTP	17	12	14	12
SLTA	13	35	20	32

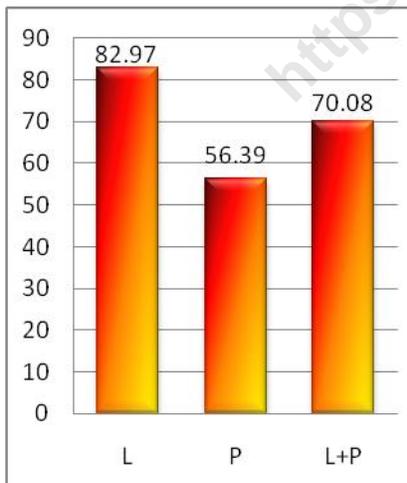
4. Ketenagakerjaan

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Berdasarkan data Sakernas 2010, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan atau yang termasuk kategori angkatan kerja pada tahun 2010 tercatat sebesar 70,08 persen, terdiri dari 82,97 persen dari jumlah penduduk laki-laki, dan 56,39 persen dari jumlah penduduk perempuan.

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja pada tahun 2009 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri di Sumba Barat perempuan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan jumlahnya juga cukup banyak. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan semakin besarnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah.

**Tabel 4.1 TPAK Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	82,97	56,39	70,08

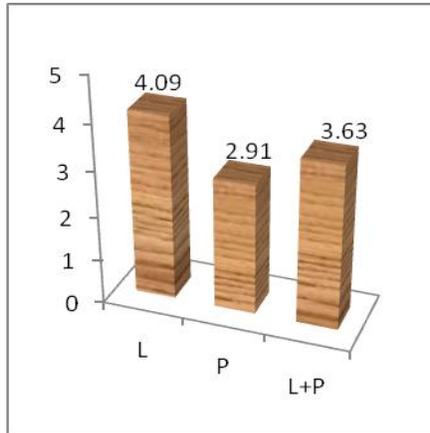
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

**Tabel 4.2 Kesempatan Kerja Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2010**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	95,91	97,09	96,37

Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2010 tingkat kesempatan kerja sebesar 96,37 persen.

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2010



Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2010

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	4,09	2,91	3,63

Tabel 4.3 menunjukkan angka pengangguran terbuka tahun 2010. Angka-angka yang tertera pada tabel 4.3 ternyata masih relatif rendah bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini terjadi karena di Sumba Barat dan Indonesia pada umumnya, menganggur merupakan keadaan yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk, sehingga kesempatan kerja yang tersedia langsung diterima sebagai pekerjaan padahal kesempatan kerja yang ada tersebut umumnya adalah sektor informal. Secara definisi mereka dianggap bekerja tapi pendapatan yang diperoleh sangat tidak mencukupi.

Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2010 sebanyak 71,14 persen pekerja diserap sektor primer. Tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan minimnya perkembangan pada sektor yang lebih modern, yaitu sektor sekunder/industri dan sektor jasa-jasa/tersier. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, persentase penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi)

dan tersier (perdagangan; angkutan; keuangan; dan jasa) pada tahun 2010 hanya sebesar 7,29 persen dan 21,57 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2010

Lapangan Usaha Utama	2010
(1)	(2)
Primer	71,14
Sekunder	7,29
Tersier	21,57

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 9,80 persen sedangkan berusaha dibantu anggota rumahtangga atau buruh tidak tetap adalah komposisi terbesar yaitu mencapai 33,95 persen.

Tabel 4.5 Komposisi Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2010

Status Pekerjaan Utama	2010
(1)	(2)
Berusaha Sendiri	9,80
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh tidak dibayar	33,95
Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh dibayar	0,69
Buruh/Karyawan/Pegawai	17,76
Pekerja Bebas di Pertanian	0,07
Pekerja Bebas di Non Pertanian	0,52
Pekerja Tidak Dibayar	37,21

Tabel 4.5 juga memperlihatkan bahwa jumlah pekerja berstatus buruh/karyawan tahun 2010 yaitu sebanyak 17,76 persen. Pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap yaitu 0,69 persen pada tahun 2010. Kedua kategori ini, buruh/karyawan dan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal yang jumlahnya hanya mencapai 18,45 persen pada tahun 2010. Dengan demikian pada tahun 2010, jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 81,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sumba Barat bekerja di sektor informal, dimana pekerja tersebut adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap tanpa harus menerima upah yang tetap atau bahkan anggota rumahtangga yang tidak menerima upah sepeser pun.

Jam Kerja

Jumlah jam kerja selama seminggu dapat memberikan gambaran tingkat produktivitas. Pada tahun 2010 masih cukup banyak ditemui penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu). Penduduk perempuan pada umumnya lebih banyak yang kurang produktif, yang mana sebanyak 59,33 persen pekerja perempuan bekerja kurang dari 35 jam seminggu, sedangkan laki-laki jumlah pekerja yang bekerja dengan jumlah jam yang sama, yakni kurang dari 35 jam per minggu berjumlah 54,80 persen.

**Tabel 4.6 Persentase Penduduk yang Bekerja
Kurang Dari 35 Jam Seminggu Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2010**

Uraian		2010
(1)		(2)
Laki-laki	< 35	54,80
	≥ 35	45,20
Perempuan	< 35	59,33
	≥ 35	40,67
L + P	< 35	56,58
	≥ 35	43,42

Lebih banyaknya penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal, yaitu sebanyak 56,58 persen, menandakan masih rendahnya produktivitas kerja, hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja berkerja di sektor informal yang tidak memiliki rutinitas jam kerja yang tetap dan pasti.

5. Pola Konsumsi

5. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Makin besar pendapatan atau penghasilan suatu rumah tangga, berarti makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya makin kecil pendapatan suatu rumah tangga berarti makin rendah tingkat kesejahteraannya. Penghitungan pendapatan masyarakat secara langsung melalui survei seringkali sulit dilakukan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu, maka penghitungannya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran ini selain dapat diketahui jumlah pendapatan, juga dapat dilihat pola konsumsi masyarakat, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya akan semakin baik, sebaliknya makin tinggi persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya makin buruk. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi pelbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Tabel 5.1 menyajikan perkembangan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumba Barat pada periode 2009-2010 yang belum memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan baik jika dikaitkan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2009 adalah Rp. 279.201. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp. 380.857 atau terjadi kenaikan nominal sebesar 36,41 persen.

Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Tahun 2009 - 2010

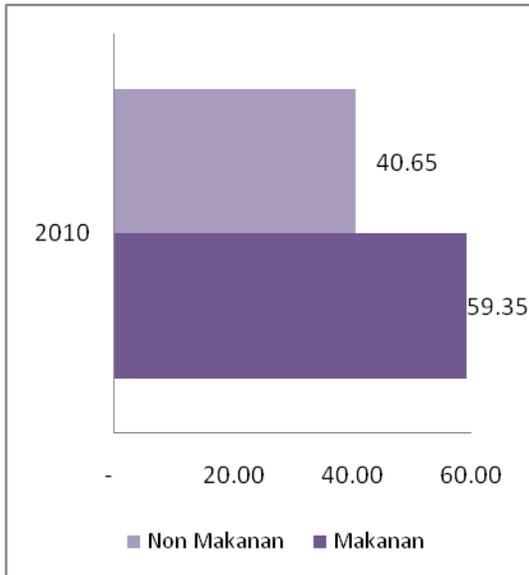
Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Kenaikan Nominal Setahun* (%)
(1)	(2)	(3)
2009	279.201	
2010	380.857	36,41

*) *Dihitung secara geometric*

Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 masih diyakini telah berakibat pada pola pengeluaran rumah tangga khususnya yang berpendapatan rendah. Perubahan pola konsumsi tersebut terjadi karena adanya penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang memaksa mereka khususnya yang berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan dengan melakukan tindakan dengan memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

Gambar 5.1
Pengeluaran per Kapita
Sebulan menurut Jenis
Pengeluaran Tahun 2010



Tabel 5.2 Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2010 (Rupiah)

Tahun	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	226.023 (59,35)	154.834 (40,65)	380.857

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase pengeluaran

Tabel 5.2 menyajikan perubahan pola konsumsi rumah tangga selama periode 2010. Pada periode 2010, porsi pengeluaran untuk makanan adalah sebesar 59,35 persen. Sedangkan porsi pengeluaran untuk non makanan sebesar 40,65 persen. Pola konsumsi dimana porsi pengeluaran untuk makanan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan memberikan petunjuk bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai selama periode tersebut.

6. Perumahan & 6. Perumahan & Lingkungan

Perumahan dan Lingkungan

Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin bersama orang lain, maka muncul kelompok rumah-rumah yang disebut pemukiman.

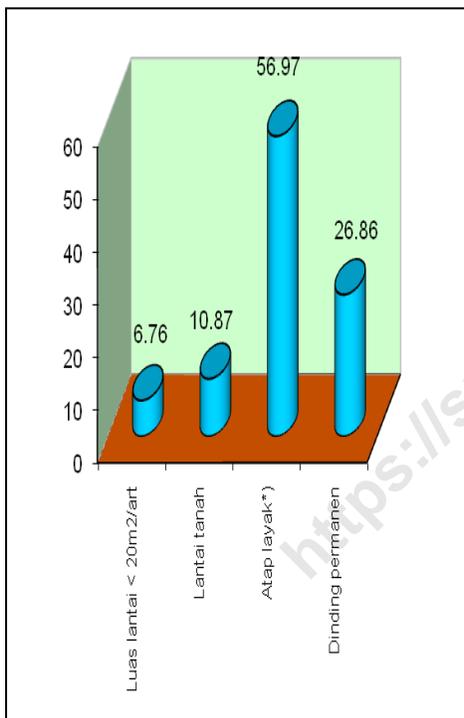
Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu merupakan hal penting yang menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2010 tercatat sekitar 6,76 persen rumah tangga di Sumba Barat yang tinggal dalam rumah dengan ruang yang tersedia untuk setiap anggota rumah tangganya kurang dari 20 m². Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (93,24 persen) tinggal dalam rumah dengan luas yang memadai.

Kualitas perumahan di Sumba Barat pada periode 2009-2010 ditunjukkan pada tabel 6.1, yang menunjukkan adanya sedikit perubahan pada persentase rumah tinggal yang berlantai tanah yakni dari 16,55 persen menjadi 10,87 persen. Hal ini disebabkan karakteristik budaya masyarakat Sumba Barat yang membuat rumah panggung.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Indikator
Kualitas Perumahan
Tahun 2010



Tabel 6.1 **Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2009-2010**

Indikator Kualitas Perumahan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Luas lantai < 20 m ² /art	7,07	6,76
Lantai tanah	16,55	10,87
Atap layak *)	51,67	56,97
Dinding Permanen	25,46	26,86

*) Tidak terbuat dari dedaunan

Tidak jauh berbeda dengan indikator lantai tanah, indikator dinding tembok permanen menunjukkan angka yang bisa dikatakan masih cukup kecil meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 26,86 persen. Sebagaimana pada indikator lantai tanah, hal ini dikarenakan masih banyak rumah adat di Sumba Barat masih menggunakan dinding bambu atau kayu. Kondisi yang baik ditunjukkan oleh indikator atap layak, dimana persentasenya menunjukkan peningkatan dari 51,67 persen menjadi 56,97 persen rumah tangga sudah menggunakan atap layak (untuk Sumba Barat banyak masyarakat yang telah menggunakan atap seng). Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, jika dilihat dari kualitas bahan bangunan yang dipakai, kondisi perumahan di Sumba Barat belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

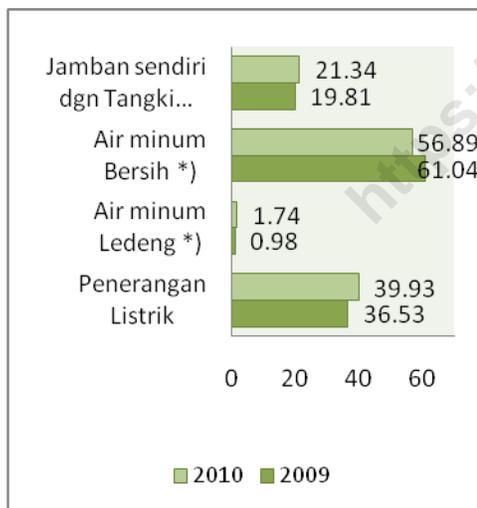
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2009-2010

Indikator Fasilitas Perumahan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
Penerangan Listrik	36,53	39,93
Air Minum Ledeng*)	0,99	1,74
Air Minum Bersih **)	61,04	56,89
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	19,81	21,34

*) *Leding meteran dan Leding Eceran*

***) *Bersumber dari sumur/mata air yang jaraknya ke tempat pembuangan limbah > 10 m*

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2009 - 2010



Seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 pada tahun 2009 sudah sekitar lebih dari 35 persen rumah tangga di Sumba Barat menggunakan listrik sebagai alat penerangan, dan jumlahnya terus meningkat menjadi 39,93 pada tahun 2010. Meskipun demikian masih banyak kecamatan, desa yang belum dapat dijangkau oleh PLN, sehingga masih menggunakan penerangan pelita/obor. Masih terbatasnya pasokan listrik di Sumba Barat, menyebabkan biaya pemasangan listrik PLN masih cukup mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Program penyediaan air bersih tersebut ternyata belum dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang mempunyai akses pada air ledeng. Persentase rumahtangga yang menggunakan air ledeng pada tahun 2009 sebesar 0,99 persen dan meningkat menjadi 1,74 persen pada 2010. Rumah tangga yang tidak mempunyai akses pada air ledeng, sumber air minumnya diperoleh dari air kemasan maupun air isi ulang, sumur, dan mata air. Sumur atau mata air dikatakan sebagai sumber air bersih jika jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 meter. Persentase rumah

Perumahan dan Lingkungan

tangga dengan sumber air minum bersih (jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 meter) pada tahun 2010 tercatat sebesar 56,89 persen (dengan catatan 33,62 persen tidak mengetahui jaraknya) yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2009 yang mencapai 61,04 persen.

Fasilitas rumah tinggal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2009 tercatat sekitar 19,81 persen rumah tangga di Sumba Barat yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2010 jumlah tersebut meningkat menjadi 21,34 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- 1992, **Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta: Biro Pusat Statistik
- 1992, **Penduduk Nusa Tenggara Timur: Hasil Sensus Penduduk 1990**, *Seri S2*, Jakarta: Biro Pusat Statistik
- 1997, **Pedoman Analisis Data Susenas Bidang Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta: Biro Pusat Statistik
- 1999, **Indikator Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 1999, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur**, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2000, **Penduduk Nusa Tenggara Timur: Hasil Sensus Penduduk 2000**, *Seri L2.2.18.18*, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2000, **Penduduk Sumba Barat: Hasil Sensus Penduduk 2000**, *Seri L2.2.18.18*, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2003, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Timur**, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2003, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2004, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2007, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**, Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2007, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**, Waikabubak: Badan Pusat Statistik
- 2010, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**, Waikabubak: Badan Pusat Statistik

ISTILAH TEKNIS

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Anak Wanita

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-44 th).

Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekan salah satu metode kontrasepsi.

Klinik Keluarga Berencana

Tempat dimana pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh. Tempat ini dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), Team Medis Keliling (TMK) atau tempat bebas lainnya yang ditentukan.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

ISTILAH TEKNIS

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Kasar

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

<https://smbabaratkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jl. Wee Karou, Waikabubak - Sumba Barat
Nusa Tenggara Timur 87211

Telp. / Fax. (0387) 21256 Email : bps5301@bps.go.id